

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hayat, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Inu Kencana Syafii, 2011, *Etika Pemerintahan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Ladzi Safroni, 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi*, Surabaya:Aditya Media.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia
- S.F. Marbun, 2011, *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”*. FH UII Press. Yogyakarta
- Sirajuddin, dkk., 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partiiipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang:Setara Press.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press.
- Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Yudhi Setiawan, dkk., 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Depok:Rajawali Pers.
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2018, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung:Pustaka Setia.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

JURNAL

- Akbar Dinata, "Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2015", *Jurnal Skripsi e-KTP Kecamatan Tambelan*, 2015.
- Alfario Christofel Rumajar, dkk, "Sanksi Hukum bagi Kepala Daerah yang Tidak Menjalankan Pelayanan Publik Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman", *Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 4, 2020.
- Dian kus Pratiwi, "Mekanisme dan Implikasi Desentralisasi Pelayanan Publik Terhadap Wewenang Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik", *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.1, 2004.
- Didik Fatkhur Rohman, dkk. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1(5): No. 964, 2011
- Emilia Dwi Setiawan Sianipar, Efektivitas Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Batam. *Journal of Judicial Review*. Vol. XXI: No. 2 Batam, 2019
- Koko Mulyanto Angkat, dkk, "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dairi", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7: No. 1, Medan, Juni 2017.
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, 2011
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan". *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*. Vol. 5: No. 2, Semarang, 2016.
- Muhammad Rus'an Yasin, Telaah tentang Rekomendasi Ombudsman tentang Fraud Perbankan. *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 4: No. 11, 2016
- Muzanni, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hal Pelayanan Publik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 3 No.1, 2015
- Sri Nur Hari Susanti, Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemeintahan, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. .3, 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 2 ayat (4) dan (5) serta Pasal 16

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam

Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang Tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik berlaku seumur hidup

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471/1768/SJ
tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran

WEBSITE

<https://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/ktpel/152-fungsi-dan-kegunaan-e-ktp>, diakses Pada hari Sabtu, 2 januari 2021 pukul 14.09

<https://kumparan.com/kepribadian/sudah-rekam-2-tahun-lalu-warga-batam-ini-belum-terima-e-ktp-1u0o3mSPFBk/full>, diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 pukul 12.01 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2006-administrasi-kependudukan>, diakses pada hari Selasa, 3 Maret 2020 pukul 16.20 WIB

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--pertanahan-dan-disdukcapil-terbanyak-dilaporkan-ke-ombudsman-kepri> diakses pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, pukul 14.48

<https://kepri.haluan.co/2019/12/03/2019-10-ribuan-e-ktp-belum-dicetak-di-dua-kecamatan/>, diakses pada hari jum'at, tanggal 7 agustus 2020 pukul 13.23 WIB

